

**Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)
(Suatu Studi Di Desa Tawa Bacan Tengah Kabupaten Halmahera Selatan)**

**Frensi Molle
T. Sondakh
A. Laloma**

Abstract: The purpose of this study to determine the Community Participation in Planning National Program of Rural Community Empowerment (PNPM-MP) In the village of Tawa Central Bacan District South Halmahera as a general purpose of the National Program for Community Empowerment in Rural Areas is to improve the livelihoods and employment opportunities of the poor in rural areas. To determine the Public Participation in Planning National Program for Community Empowerment Rural (PNPM-MP), the researchers refer to the theories Ericson (in Slamet, 1994: 89) forms of community participation in development is divided into three stages, namely: participation in planning, participation in the implementation of, and participation in pemanfaatan. Dengan using qualitative method where the researcher as a key instrument consisting of 6 informants.

Public participation in the planning of the National Program of Rural Community Empowerment (PNPM-MP) in the village of Tawa not running optimally. Because according to the reality in the field is only part of the population that participated in the form of thoughts or suggestions and input in the preparation of development programs or the National Program for Community Empowerment of Rural .; Public participation in the implementation phase of men more active role in the implementation of self-help in the form of energy, thoughts, and material. While women prefer the affairs of the household, as well as the community's participation in the development stage of utilization of the National Program for Community Empowerment is not groomed properly, so it is not proper to be used again by the public.

To achieve the general objectives of the National Program of Rural Community Empowerment (PNPM-MP), the village government should give attention to disseminating the program to the public by calling or inviting the public to participate in the planning stage. Society as a target group of the National Program for Community Empowerment Rural, it is expected berperanaktif in the implementation of both men and women. Because basically the purpose of PNPM-MP is to improve the lives of local people. As well as the village government needs to provide a good understanding of the community in the maintenance of the results of development of the National Program for Community Empowerment or village government needs to create a maintenance team is the result of development of National Program of Rural Peoples, Mandiri (PNPM-MP) in the village of Tawa.

Keywords: Paritsipasi Society, the National Program for Community Empowerment Rural.

Pendahuluan

Undang- undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional yang mengatur ruang gerak bangsa ini. Artinya kebijakan pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa harus seturut dan sejalan dari amanat konstitusi. Ini merupakan acuan yang konkret terhadap partisipasi masyarakat untuk menyikapi

perkembangan global. Sebuah tuntutan kebebasan serta pemerdayaan masyarakat.

Perkembangan globalisasi yang semakin marak ini, kini pembangunan tidak hanya berorientasi dan menjadi fokus dipusat, tapi juga diharapkan sampai pada tataran lokal. Siap ataupun tidak dari masyarakat untuk menyikapinyai perkembangan globalisasi

bukanlah menjadi sebuah pilihan, tapi kemudian harus dihadapi dan di jalani. Ini merupakan impact dari kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi yang menembus sekat administrasi dan geografis negara kita. Untuk itu diperlukan perencanaan dan persiapan serta partisipasi matang dari masyarakat. Dalam demokrasi kontemporer, masyarakat sipil merupakan salah satu indikator untuk menentukan derajat demokrasi sebuah masyarakat, tidak hanya pada level negara tetapi juga sampai pada tataran struktur pemerintahan terendah, yaitu desa itu sendiri. Eksistensi serta kualitas masyarakat sipil semakin diperhitungkan dalam dinamika politik nasional maupun lokal.

Desa sejak dahulu merupakan wilayah-wilayah yang mandiri (otonom) dalam mengatur dan mengurus wilayahnya dan penduduknya sesuai dengan adat istiadat dan tata caranya sendiri. Keistimewaan desa yaitu memiliki susunan yang asli sesuai adat istiadatnya, oleh karenanya Negara Kesatuan Republik Indonesia menghormati kedudukan desa. Disamping itu pula, setiap acuan atau konstitusi yang mengatur ruang gerak bangsa ini tidak bisa mengabaikan hak-hak asal usul desa tersebut. Istilah desa berasal dari bahasa sansekerta, *deshi*, yang artinya tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Istilah desa dikenal hanya di daerah Jawa dan Madura, sedangkan daerah lain mengenai istilah yang berbeda seperti *Gampong* dan *Meunasah* di Aceh, *Huta* di Batak, *Nagari* di Sumatera Barat dan sebagainya. Pada hakekatnya bentuk desa dapat dibedakan menjadi dua yaitu desa Genotologis dan Desa Tradisional. Sekalipun nama desa ataupun daerah hukum yang singkat desa di Indonesia bervariasi, akan tetapi asas atau landasan hukumnya hampir sama yaitu adat, kebiasaan dan hukum adat.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat bisa mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal. Peran serta

masyarakat terhadap program pemerintah yang berorientasi untuk kemasyalatan rakyat diharapkan bisa secara nyata dan kontinu. Memang tidak bisa dipungkiri, bahwa masyarakat punya kontribusi yang besar bagaimana untuk kemudian dalam menjalankan roda pemerintah di negara kita ini. Karena bisa dianalogikan bahwa masyarakat dan pemerintah sebagai instrumen pengambil kebijakan itu seperti mata uang logam yang tidak bisa dipisahkan. Artinya antara kedua ini, memiliki hubungan erat yang saling berkaitan. Masyarakat diberdayakan adalah indikator bahwa pemerintah dengan leluasa memberikan kebebasan hak otonom yang kemudian diatur dengan konstitusi yang dianut oleh negara kita.

Pemberdayaan masyarakat terutama di tataran pedesaan tidak hanya cukup dengan meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan atau memberi modal saja terhadap masyarakat. Tapi harus pula diimbangi dengan adanya perubahan struktural sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi serta juga kemudian bisa memperbaiki empat akses, yaitu pertama akses terhadap sumber daya, kedua akses terhadap teknologi, ketiga akses terhadap pasar, dan yang keempat akses terhadap sumber pembiayaan. Ini merupakan langkah konkret untuk membijaki agar partisipasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan itu bisa nyata dan menyentuh di semua elemen, baik itu masyarakat maupun pemerintah sebagai penyelenggaraan pemerintah desa.

Berbagai program nasional yang pemerintah canangkan guna membantu masyarakat miskin, guna meningkatkan kemampuan serta kemandiriannya. Antara lain sejak tahun 1970-an masyarakat diarahkan menjadi subjek terpenting pembangunan. Pembangunan yang bertumpu pada masyarakat dengan strategi pemberdayaan (Sumodiningrat, 2009). Program khusus

penanggulangan kemiskinan dimulai dengan program Inpres Desa Tertinggal (INPRES) Sebagai stimulus untuk kemudian menanggulangi kemiskinan dinegeri kita ini. Berdasarkan program IDT, dikembangkan dengan P3DT (Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal) tahun 1995. Dalam tahapan selanjutnya, P3DT disempurnakan menjadi PPK (Program Pengembangan Kecamatan) tahun 1998. Sejalan dengan itu, dikembangkan pula P2PK (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan), PDMDKE (Pemberdayaan Daerah Mengatasi Danpak Kritis Ekonomi), dan P2MPD (Proyek Pembangunan Masyarakat dan Pemerintahan Desa).

Historis panjang yang pemerintah bijaki, guna menanggulangi serta meminimalisir tingkat kemiskinan, tapi kemudian tidak berhenti sampai disitu, tapi kemudian dengan intens melakukan pencegahan tersebut. Diantaranya pada tahun 2007 pemerintah Indonesia mencanangkan solusi baru yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PKK), Yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PKK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan kelompok rakyat miskin, efisiensi efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat (PTO PNPM-MD, 2007). Ini merupakan parameter dari keberhasilan tersebut.

PNPM Mandiri Perdesaan memiliki visi yang relevansi dengan kebutuhan serta gumulan bangsa, yaitu Terciptanya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti

terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada dilingkungannya, mampu mengakses sumber daya diluar lingkungan, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah : (1) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (4) Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Dalam rangka mencapai visi misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan Rumah Tangga Miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, memperkuat sistem pembangunan yang berorientasi pada partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Beranjak dari visi dan misi tersebut serta streategi tersebut yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih cenderung ditekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Sebuah harapan besar, dengan adanya PNPM kemudian dapat menuntaskan secara perlahan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

PNPM Mandiri Perdesaan sebagai salah satu Program Nasional pemerintah yang sasaran utamanya adalah masyarakat miskin perdesaan untuk kemudian bisa dimandirikan dan mendapat kesejahteraan yang merata, maka PNPM Mandiri Perdesaan diberlakukan untuk daerah-daerah yang dianggap memiliki masyarakat miskin. Desa Tawa Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan merupakan sasaran dari PNPM Mandiri Perdesaan tersebut, desa inipun mempengaruhi pembangunan yang signifikan di kabupaten

Halmahera Selatan, PNPM Mandiri Perdesaan direalisasikan dengan kegiatan- kegiatan seperti:(1) Pembuatan jalan setapak, dan (2) Pembuatan MCK.

Sampai saat ini pembangunan daerah perdesaan belum memuaskan hasilnya. Walaupun pemerintah telah mengupayakan pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri Perdesaan, namun tetap saja hasilnya tidak semaksimal yang diharapkan oleh masyarakat. Beberapa kekurangan ini mungkin dipengaruhi oleh beberapa hal seperti:

- 1) Kurangnya sosialisasi awal mengenai PNPM Mandiri Perdesaan sehingga menimbulkan salah pengertian dimasyarakat mengenai mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan yang mengakibatkan kurangnya partisipasi (masyarakat terutama dari masyarakat miskin) dalam proses perencanaan sehingga hasil dari kegiatan tersebut tidak dinikmati oleh masyarakat miskin;
- 2) Beberapa masyarakat tidak terlalu puas, karena setiap program yang telah dikerjakan tidak secara jelas dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- 3) Di desa tersebut tidak ditemukan tim pemeliharaan sehingga banyak hasil kegiatan yang terbangkalai, tapi bila akan di adakan pemeriksaan barulah lokasi tersebut dibersihkan.

Jika demikian, maka pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah namun partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat agar program yang dijalankan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan juga dapat dimanfaatkan dalam waktu yang cukup lama sebab telah banyak bukti yang menunjukkan apabilah inisiatif hanya datang dari pemerintah tanpa melibatkan masyarakat, perjalanan pembangunan akan diwarnai dengan monopoli

dan manipulasi serta tidak adanya rasa memiliki dari masyarakat sehingga program tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan mengakibatkan masyarakat akan tetap terpuruk pada keadaan yang tidak berdaya.

Berdasarkan penjelasan/uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti "*Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP)*". Yang telah direalisasikan didesa Tawa Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan?

Tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat terhadap PNPM MP
2. Untuk mengetahui dampak PNPM Mandiri Perdesaan bagi pembangunan di desa Tawa Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan.

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, diharapkan dapat meningkatkan dan memperkaya khasana keilmuan dalam bidang disiplin Ilmu Administrasi Publik yang fokusnya pelayanan publik yang relevansinya dengan Program pemberdayaan masyarakat desa terhadap pembangunan daerah
2. Manfaat secara praktisi :
 - a. Bagi pemerintah desa: diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap program pemberdayaan masyarakat desa
 - b. Bagi masyarakat: diharapkan hasil penelitian dapat meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat desa sehingga masyarakat dapat menjadi lebih mandiri, aktif dan inisiatif.

- c. Bagi penulis : penelitian ini merupakan sarana peningkatan kemampuan ilmiah penulis dari teori-teori yang telah didapat dalam aspek pemerintahan. Juga memberikan pemahaman lebih jauh bagi penulis untuk dapat membantu dalam memberdayakan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif atau penelitian naturalistik adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya dengan tidak dirubah dalam simbol-simbol atau bilangan. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjaring data atau informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek, atau bidang pada objeknya (Nawawi, 1994:104-105).

Menurut Dabbs analisis kualitatif fokusnya pada penunjukan makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data pada konteks masing-masing, dan seringkali melukiskannya didalam kata-kata daripada angka-angka (Faisal, 1999:256)

Berdasarkan judul penelitian yang peneliti kemukakan "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) (Suatu studi di Desa Tawa Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan). Maka indikator yang ukur denganberpacu pada teori Ericson (dalam Slamet, 1994:89) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas 3 tahap, yaitu: *Partisipasi dalam*

perencanaan, Partisipasi dalam pelaksanaan, dan Partisipasi dalam pemanfaatan.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian yaitu :

- a) Yang mewakili pihak pemerintah kecamatan adalah Camat
- b) Yang mewakili pemerintah desa adalah 3 orang
- c) Yang mewakili masyarakat adalah 2 orang

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Tawa Bacan Timur Tengah.

Yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Observasi

Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk mengamati kegiatan informan/responden secara langsung, baik di desa sampel sebagai lokasi penelitian ini. Hal-hal yang diamati, antara lain aktifitas serta yang berkaitan dengan realisasi PNPM MP. Dengan observasi ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat mana dari setiap perilaku informan yang nampak.

2. Wawancara mendalam (Indepeth Interview)

Teknik pengumpulan data ini di gunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-bercakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti yang sifatnya mendalam. Wawancara ditujukan pada para informan kunci.

3. Dokumentasi

Dokumen ialah setiap bahan yang tertulis atau film yang dipersiapkan untuk penelitian, pengujian suatu peristiwa atau record maupun yang tidak dipersiapkan untuk itu (Moleong, 1999). Data sekunder ini diperoleh dari berbagai sumber yang terkait di

desa Tawa Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan. Disamping dokumentasi dilokasi penelitian, juga dilakukan melalui pengambilan data dari perpustakaan dan internet.

Metode ini menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Linclon dan Guba dalam Moleong (2007:112) yang terdiri dari empat kegiatan yang dilakukan dari awal hingga selesainya kegiatan yaitu :

1. Pengumpulan data yaitu yang dilakukan melalui observasi atau wawancara lalu dilakukan pencatatan dan pengetikan serta penyuntingan seperlunya.
2. Reduksi yakni mengadakan pemilihan terhadap data yang ada, mempertajam data analisis, meringkas serta membuang data yang tidak diperlukan.
3. Menyediakan data yakni menyediakan data serta menyederhanakan data yang telah diperoleh agar dapat memudahkan penelitian dalam penarikan kesimpulan.
4. Penarikan kesimpulan yakni melakukan verifikasi dengan meninjau ulang catatan atau data yang diperoleh serta menganalisis sebab akibat termasuk bertukar pikiran dengan teman-teman sejawat dan masyarakat dan kemudian mengambil kesimpulan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan dengan ulasan pada bagian awal maka penulis akan menganalisis data yang telah di peroleh di lapangan. Untuk mengamati yang lebih detail maka teknik analisis data yang dikembangkan oleh Linclon dan Guba dalam Moleong (2007:112) yang terdiri dari empat kegiatan yang dilakukan dari awal hingga selesainya kegiatan yaitu :

1. Pengumpulan data yaitu yang dilakukan melalui observasi atau wawancara lalu dilakukan pencatatan dan pengetikan serta penyuntingan seperlunya.

2. Reduksi yakni mengadakan pemilihan terhadap data yang ada, mempertajam data analisis, meringkas serta membuang data yang tidak diperlukan.
3. Menyediakan data yakni menyediakan data serta menyederhanakan data yang telah diperoleh agar dapat memudahkan penelitian dalam penarikan kesimpulan.
4. Penarikan kesimpulan yakni melakukan verifikasi dengan meninjau ulang catatan atau data yang diperoleh serta menganalisis sebab akibat termasuk bertukar pikiran dengan teman-teman sejawat dan masyarakat dan kemudian mengambil kesimpulan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) sangat dibutuhkan oleh pemerintah, dengan tujuannya agar program yang dilaksanakan merupakan hasil musyawarah bersama antara masyarakat dengan pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya merupakan kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap program. Swadaya masyarakat merupakan salah satu wujud partisipasi dalam pelaksanaan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan. Swadaya bisa diwujudkan dengan menyumbangkan tenaga, dana, maupun material pada saat pelaksanaan kegiatan. Dasar keswadayaan adalah kerelaan masyarakat, sehingga harus dipastikan bebas dari tekanan atau keterpaksaan.

Untuk menjamin hal tersebut diatas maka diperlukan *partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan* Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP). Yang dimaksud dengan partisipasi dalam tahap perencanaan adalah

masyarakat ikut berpartisipasi dalam penyusunan program dengan menyampaikan gagasan atau pikiran serta kritikan yang bersifat membangun. Tujuan dari keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan agar program yang disusun dan disepakati merupakan hasil dari musyawarah. Oleh karena itu, PNPM Mandiri Perdesaan hadir untuk meningkatkannya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri sebagai prioritas mendesak, khususnya terhadap masyarakat pedesaan. PNPM-MP sebagai program penanggulangan kemiskinan di pedesaan lebih mengutamakan pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya dengan mendudukkan masyarakat sebagai pelaku utamanya melalui partisipasi aktif. Melalui partisipasi aktif ini dari masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran tidak hanya berkedudukan menjadi objek program. Partisipasi masyarakat menjadi sangat penting mengingat kompleksitasnya masalah kemiskinan yang ada, yaitu sebagai alat memperoleh informasi, masyarakat akan lebih percaya terhadap program pembangunan, dan sebagai wadah penyaluran hak demokrasi.

Selanjutnya *partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan* PNPM-MP sangat diperlukan oleh pemerintah desa guna menciptakan kebersamaan yang baik dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan operasional pembangunan merupakan keikutsertaan dari semua masyarakat dalam membantu berjalannya pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang ditunjukkan dengan ikut bekerja maupun memberikan swadaya dalam program yang telah dibuat oleh pemerintah demi kemajuan pembangunan. Keberhasilan suatu pembangunan yang diinginkan oleh pemerintah adalah terwujudnya semua program-program yang telah direncanakan dengan partisipasi secara langsung oleh masyarakat baik itu di dalam pelaksanaan kerja, maupun memberikan bantuan tenaga, pikiran maupun materi yang bertujuan untuk

mensukseskan pembangunan yang telah diupayakan agar berhasil sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah.

Begitu juga dalam pelaksanaan PNPM-MP diharapkan semua lapisan masyarakat berperan aktif untuk mendukung semua program yang sudah dibuat bersama. Karena pada dasarnya program yang dicanangkan oleh pemerintah diperuntukan untuk pembangunan desa yang berimplikasi pada kehidupan masyarakat setempat.

Kemudian juga *partisipasi masyarakat dalam tahap pemanfaatan* PNPM-MP sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Tujuan dari pada itu agar hasil pembangunan memberi dampak yang baik terhadap masyarakat. Oleh karena itu partisipasi masyarakat di dalam PNPM Mandiri Perdesaan merupakan peran serta masyarakat dalam memelihara hasil pembangunan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah dibangun, serta melakukan pemeliharaan secara bersama-sama oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat yang ditunjukkan dengan sikap mau ikut memanfaatkan dan merawat hasil pembangunan melalui PNPM Mandiri Perdesaan.

Berhubung dengan hal tersebut diatas maka pemerintah sebagai pengelola administrasi pembangunan diharapkan memberikan suatu pemahaman yang baik terhadap masyarakat berkaitan dengan hasil pembangunan agar masyarakat ikut andil dalam pemeliharaan terhadap pembangunan PNPM-Mandiri Pedesaan.

Bertolak dari uraian diatas, maka peneliti dapat menganalisis secara ilmiah tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Desa Tawa. Untuk mengetahuinya maka peneliti merujuk pada teori Ericson (dalam Slamet, 1994:89) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas 3 tahap, yaitu: *Partisipasi dalam tahap perencanaan, Partisipasi dalam tahap*

pelaksanaan, dan Partisipasi dalam tahap pemanfaatan. Kemudian peneliti menghubungkan dengan hasil penelitian dilapangan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Desa Tawa belum berjalan dengan maksimal.

Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) sangat diperlukan, karena pembangunan yang dilaksanakan bukan hanya untuk kepentingan individual tetapi kepentingan bersama. Maka dengan itu masyarakat sebagai kelompok sasaran harus berperan aktif dalam memberikan masukan serta saran yang konstruktif terhadap pemerintah desa dalam penyusunan program. Namun berdasarkan dengan hasil penelitian dilapangan menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan masih sangat kurang. Dimana banyak masyarakat yang belum adanya kesadaran diri tentang program pembangunan desa yang disusun secara musyawarah guna menciptakan suasana yang kondusif bagi masyarakat. Dan lagi pula sebagian masyarakat yang hadir dalam pertemuan penyusunan program hanya ingin mendengarkan informasi yang berkaitan dengan PNPM-Mandiri Pedesaan yang akan dilaksanakan tanpa memberikan pikiran serta saran terhadap pemerintah.

Kemudian juga partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Desa Tawa belum berjalan sesuai dengan harapan pemerintah. Karena realitas yang terjadi dilapangan bahwa tidak semuanya masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program PNPM-MP. Dalam artian kaum laki-laki yang berperan aktif dalam berpartisipasi dalam bentuk swadaya seperti tenaga, pikiran serta material. Sedangkan kaum perempuan tidak berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan PNPM-MP; namun mereka lebih mengutamakan urusan kebutuhan rumah tangga.

Dan begitu juga dalam pelaksanaan PNPM-MP pemerintah kurang mengawasi proses kegiatan yang sedang berlangsung, sehingga hasil yang dicapai tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Kemudian juga pemerintah kurang mensosialisasikan menyangkut dengan program pemerintah yakni PNPM-MP terhadap masyarakat sehingga menciptakan kekeliruan masyarakat terhadap mekanisme PNPM-MP. Dan ini berimplikasikan pada partisipasi masyarakat yang tidak sepenuhnya berperan aktif dalam pelaksanaan program.

Partisipasi masyarakat dalam tahap pemanfaatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Desa Tawa belum terlaksana dengan baik. Karena berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa hasil pembangunan PNPM-MP tidak terawat dengan baik, misalnya MCK yang merupakan hasil dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) dengan jumlah 3 Unit namun semuanya tidak dijaga dengan baik, sehingga tidak layak dipakai lagi oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Desa Tawa belum berjalan sesuai dengan harapan pemerintah. Karena sesuai kenyataan dilapangan hanya sebagian masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam bentuk pemikiran atau saran serta masukan dalam penyusunan program pembangunan atau PNPM-MP. Sedangkan sebagian masyarakat yang hadir hanya untuk mendengarkan informasi yang berkaitan dengan PNPM-MP yang akan dilaksanakan tanpa memberikan suatu saran ataupun

pendapat yang berhubungan dengan program PNPM-Mandiri Pedesaan di Desa Tawa.

- b. Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Desa Tawa belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Karena sesuai realita dilapangan bahwa kaum laki-laki lebih berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan secara swadaya berupa tenaga, pikiran, serta bersifat material. Sedangkan perempuan lebih mengutamakan urusan kebutuhan rumah tangga. Serta dalam pelaksanaan pemerintah desa sebagai pengelola administrasi pembangunan tidak mengawasi langsung terhadap jalanya program PNPM-MP, sehingga hasil yang dicapai tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- c. Partisipasi masyarakat dalam tahap pemanfaatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Desa Tawa belum maksimal. Karena berdasarkan penelitian dilapangan hasil pembangunan PNPM-MP tidak terawat dengan baik, sehingga tidak layak dipakai lagi oleh masyarakat.

SARAN

- a. Diharapkan kepada pemerintah desa untuk memberikan perhatian dengan mensosialisasikan program kepada masyarakat untuk menghimbau atau mengundang masyarakat untuk berpartisipasi dalam tahap perencanaan. Karena dengan adanya sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa maka tentunya masyarakat akan tahu manfaat keterlibatan dalam penyusunan program.
- b. Masyarakat sebagai kelompok sasaran dari program PNPM-Mandiri

Pedesaan, maka diharapkan berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan baik itu laki-laki maupun perempuan. Karena pada dasarnya tujuan dari PNPM-MP adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.

- c. Pemerintah desa perlu memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat dalam pemeliharaan hasil pembangunan PNPM-MP. Atau pemerintah desa perlu membuat Tim pemeliharaan hasil pembangunan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Desa Tawa.

DAFTAR PUSTAKA

Faisal, Sanapiah, 1999. *“Format-format penelitian Sosial”*. Rajawali Perss. Jakarta

Moleong, Lexy.J. 2007. *“Metodologi penelitian kualitatif”*. REMAJA KARYA. BANDUNG

Nawawi, dkk. 1994. *“Penelitian Terapan”*. Gaja Mada University Press.. Yogyakarta.

Sumodiningrat, Gunawan, 2009 *“Mewujudkan kesejahteraan bangsa: menanggulangi kemiskinan dengan prinsip pemberdayaan”*. ELEX MEDIA. JAKARTA.